

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah berhubungan dengan manusia, sumber daya alam, teknologi, modal dan lain-lain. Tenaga kerja merupakan bagian dari sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor produksi yang menjadi penggerak dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi yang dilakukan baik secara individu atau secara kelompok, sehingga menjadi peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat lainnya. Selain sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi, tenaga kerja dalam jumlah yang besar juga bisa menjadi penghambat pembangunan nasional.

Indonesia sendiri berada pada peringkat ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, ketersediaan jumlah penduduk yang sangat besar ini merupakan sumberdaya dan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi, namun hal ini juga dapat menjadi beban bagi negara. Menurut Mulyadi (2003), teori klasik

menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsabangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Teori klasik Adam Smith yang melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

Besarnya jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia ini tidak sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang terjadi, terutama pada provinsi yang diteliti dimana memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari daerah lain, namun jumlah yang seharusnya menjadi sumberdaya dan faktor produksi berbanding terbalik dengan kondisi pengangguran yang terjadi.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan TPT di 10 provinsi

Provinsi	TPT	Jml.Penduduk
Jawa Barat	7,44	49.860.330
Jawa Timur	4,88	41.416.407
Jawa Tengah	5,13	37.540.962
Sumatera Utara	5,89	15.386.640
Banten	7,52	12.307.732
DKI Jakarta	6,53	10.672.100
Sulawesi Selatan	4,33	9.362.290
Lampung	4,23	9.313.990
Sumatera Selatan	4,11	8.837.301
Riau	4,23	6.642.874

Data BPS menunjukkan TPT nasional pada Agustus 2023 sebesar 5,32 persen dimana tiga provinsi yang diteliti dalam penelitian ini masih lebih tinggi dibanding dengan TPT nasional. Banten menjadi provinsi dengan TPT yang paling tinggi di

Indonesia. BPS mencatat, tingkat pengangguran di provinsi Banten mencapai 7,52 persen, Jawa Barat sebesar 7,44 persen dan Sumatera Utara mencapai 5,89 persen.

Menurut Todaro (2003) Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berpengaruh penting tentang bagaimana terserapnya tenaga kerja di suatu daerah, sebagaimana halnya kesempatan kerja yang adalah peluang angkatan kerja dalam mengisi lowongan kerja yang tersedia dengan melakukan suatu kegiatan ekonomi (produksi), baik pekerjaan yang telah terisi ataupun lowongan yang masih kosong. Dalam hal ini kesempatan kerja dilihat dari jumlah orang yang bekerja (employment). Kesempatan kerja yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah, sedangkan kesempatan kerja yang diberikan terlalu rendah akan berakibat pada menghambatnya pembangunan ekonomi daerah serta munculnya berbagai permasalahan terkait tenaga kerja.

Biamrillah & Nurhayati (2018) menyatakan kesempatan kerja dilihat dari penduduk yang bekerja, namun realitanya hal tersebut cukup sulit didapatkan sebab kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan kerja masih terbatas dan dibayangi dengan jumlah penduduk yang sulit dikendalikan. Terutama jika ditelisik pada provinsi yang diteliti yang mana berpenduduk cukup banyak dibanding dengan provinsi lainnya namun namun tingkat pengangguran lebih tinggi dari nasional dengan jumlah penduduk yang seharusnya menjadi keuntungan pembangunan ekonomi.

Gambar 1.1 Grafik Orang Yang Bekerja Pada Lima Provinsi



Pada grafik data jumlah orang yang bekerja pada lima provinsi yang diteliti di atas, dapat dilihat perbedaan menonjol dari jumlah total penduduk yang bekerja tersebut. Dapat dilihat bahwa grafik provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dapat dikatakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua provinsi lain yaitu Sumatera Utara dan Banten ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih besar pada dua provinsi tersebut.

Seperti yang terlihat dari grafik di tahun 2016 provinsi Banten dan Sumatera Utara mengalami hal yang bertentangan, sebanyak 5,99 juta jiwa terkategori pada penduduk bekerja naik sebesar 29 ribu lebih dari tahun 2015 lalu di Sumatera Utara. Sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dimana penduduk yang bekerja di pertanian adalah pekerja keluarga yang membantu kepala keluarga. Sedangkan Banten mengalami penurunan karena jumlah tenaga kerja yang terserap di industri pengolahan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar

4,9 persen dibandingkan posisi Februari 2015 yaitu sebanyak 1.322.000 orang. Penurunan tersebut menyebabkan kontribusi industri pengolahan dalam penggunaan tenaga kerja menurun hal ini ditenggarai oleh adanya penutupan beberapa perusahaan di sektor industri pengolahan yang menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hingga keadaan ini membaik di tahun 2017, sebesar 5,08 juta orang.

Pada Jawa timur seperti pada grafik penurunan terlihat ada tahun 2016 turun menjadi 19,11 juta orang atau berkurang 253 ribu orang dibanding Agustus 2015. Berdasarkan pada publikasi BPS hal ini disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja juga pemberlakuan MEA pada akhir tenaga kerja di Jawa Timur tidak lagi akan bersaing dengan sesama kabupaten/kota di Jawa Timur maupun tenaga kerja dari provinsi tetangga, tetapi pesaing akan datang dari negara tetangga.

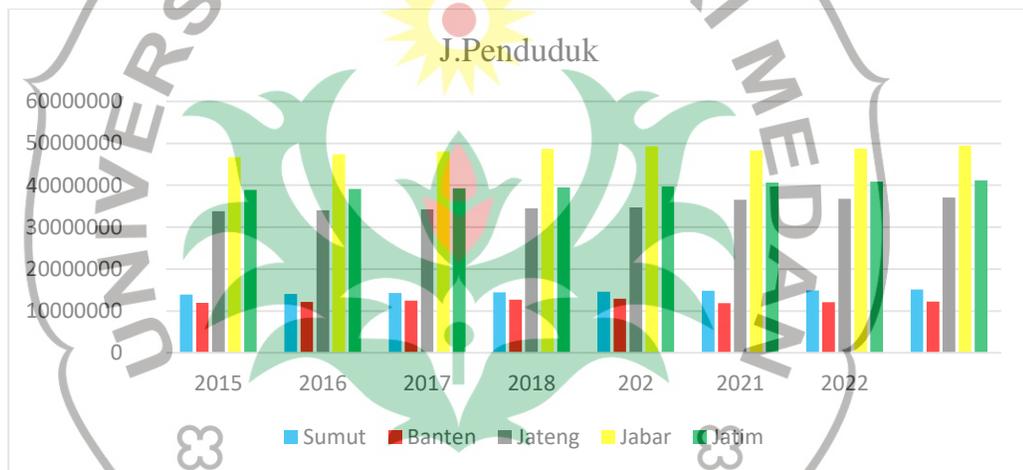
Jumlah penduduk yang bekerja ini umumnya terus meningkat di setiap tahunnya namun mengalami penurunan pada tahun 2020, ini merupakan dampak yang dirasakan akibat wabah covid-19 yang melanda. Bertambahnya jumlah kasus positif setiap hari di Indonesia menyebabkan semakin ketatnya peraturan pemerintah. Perusahaan pun mulai mengurangi jam kerja maupun tenaga kerja untuk mematuhi peraturan tersebut. Akibat dari adanya kebijakan perusahaan mengenai pengurangan tenaga kerja, jumlah pengangguran pun meningkat.

Berbagai masalah yang timbul sehingga menghambat penyerapan tenaga kerja yang merupakan beban bagi perekonomian, penyerapan tenaga kerja merupakan indikator dimana kita dapat melihat bahwa berhasilnya pembangunan ekonomi pada suatu wilayah yang terwujud dari peningkatan akan penyerapan tenaga kerja tersebut. Besarnya populasi penduduk dan juga bertambahnya angkatan kerja setiap tahun membuat lapangan pekerjaan semakin sempit hingga berdampak pada peningkatan pengangguran. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai konsumen yang memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai produsen yang menciptakan barang dan jasa dan sumberdaya utama dalam proses produksi.

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Marx pertumbuhan penduduk merupakan komoditas dan akan terserap oleh oleh system perekonomian. Namun Malthus menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32), dan akibat utama dari pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan. Hal ini didasarkan atas argumennya bahwa (1) manusia mempunyai kecenderungan alami untuk mempunyai anak (2) pertumbuhan bahan makanan tidak dapat menyamai pertumbuhan penduduk. Menurut Arsyad (2010) Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan

ekonomi. Hal tersebut berarti semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Penduduk Pada Lima Provinsi



Berdasarkan grafik perkembangan jumlah penduduk pada lima provinsi yang diteliti, dapat dilihat jika pada umumnya jumlah penduduk akan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Seperti teori Malthus yang menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah, hal ini juga terjadi pada kelima provinsi yang diteliti. Namun dapat juga dilihat beberapa perubahan kenaikan yang cukup drastis serta penurunan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dari grafik di atas kenaikan yang cukup terlihat dari tahun yang lain yaitu pada tahun 2018

penduduk Sumatera Utara berjumlah 14.415.391 jiwa dengan jumlah penduduk terkategori bekerja 6,73 juta jiwa, jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (26,34 %) penduduk yang bekerja adalah buruh atau karyawan. Kenaikan jumlah penduduk di tahun ini sejalan dengan kenaikan terhadap jumlah orang yang bekerja yang artinya perubahan jumlah dan komposisi penduduk pada tahun 2018 disertai juga dengan penyerapan tenaga kerjanya yang terlihat dari peningkatan jumlah orang bekerja. Dilihat dari grafik sebelumnya dan berdasarkan publikasi statistika BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banten pada 2016 sudah mencapai 12,2 juta orang. Dibandingkan dengan kondisi enam tahun sebelumnya, penduduk Banten tumbuh sangat pesat hingga mencapai 2,23 persen per tahun. Selain itu, juga lebih pesat dari Indonesia yang rata-rata hanya tumbuh 1,36 persen per tahun. Setiap tahun selama periode Agustus 2014 - Februari 2016, antara enam sampai tujuh orang dari sepuluh orang penduduk usia kerja Banten (penduduk usia 15 tahun ke atas), telah memasuki pasar kerja. Pada tahun 2022 provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan penduduk mencapai 37,03 juta jiwa, dengan komposisi penduduk tahun 2022 usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,58%. Unsur penyebab pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran, kematian, migrasimasuk dan keluar (Fachreza, 2015). Kenaikan ini dipengaruhi adanya penduduk daerah lain yang datang untuk bersekolah maupun mengadu nasib dan tingkat kelahiran juga tergolong tinggi. Hal ini memberikan kontribusi penambahan jumlah penduduk. Adanya kenaikan penduduk harus diimbangi penciptaan lapangan kerja baru, agar tidak timbul permasalahan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

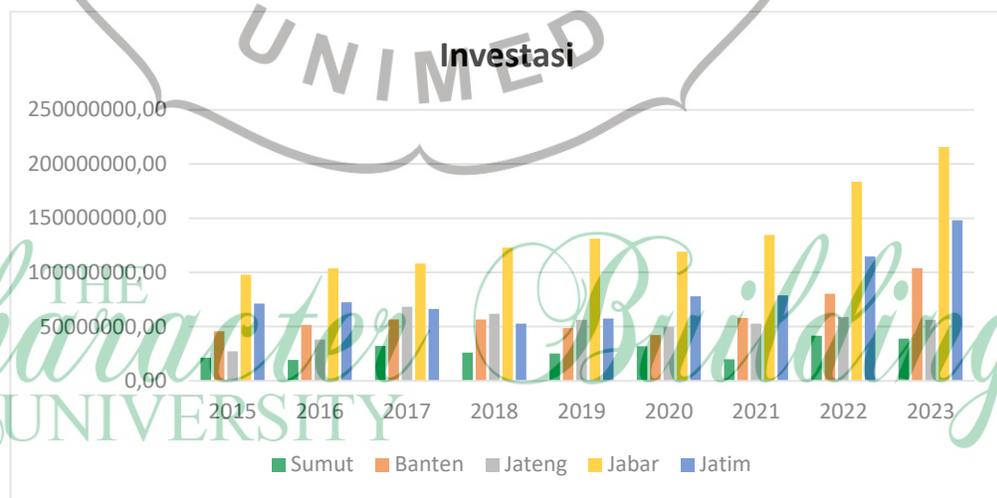
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ganie (2017) yang berjudul "Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur" jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun dalam beberapa penelitian menunjukkan hal yang bertolak seperti penelitian yang dilakukan Ratnasari dan Nugraha (2021), yang berjudul "Pengaruh UMK, Pendidikan, Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota/Kabupaten Jawa Tengah" menunjukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang meningkat akan menambah jumlah tenaga kerja dan memungkinkan suatu negara untuk menambah produksi. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja, namun hal ini masih terus menjadi masalah, berdasarkan hal ini pemerintah dituntut untuk membuat lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja.

Investasi merupakan salah satu tonggak dari strategi pembangunan baik itu PMA ataupun PMDN. Harrod dan Domar (Mulyadi, 2003) dalam teorinya menyatakan investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik di dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Dapat dikatakan bahwa investasi memiliki peranan kunci di dalam proses

ekonomi, terkhusus pada dua hal yang dimiliki oleh investasi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian (Jhingan 2016). Dengan terjadinya peningkatan kapasitas produksi membuat terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Hal ini berarti adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada. Peningkatan jumlah perusahaan maka jumlah output yang akan yang di dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Marselina, 2016).

Gambar 1.3 Grafik Investasi Pada Lima Provinsi



Penurunan investasi terjadi pada provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, yang paling jelas dapat dilihat dari kajian fiscal nasional provinsi Sumatera Utara, tahun 2018 perlambatan kinerja investasi diperkirakan bersumber dari investasi bangunan

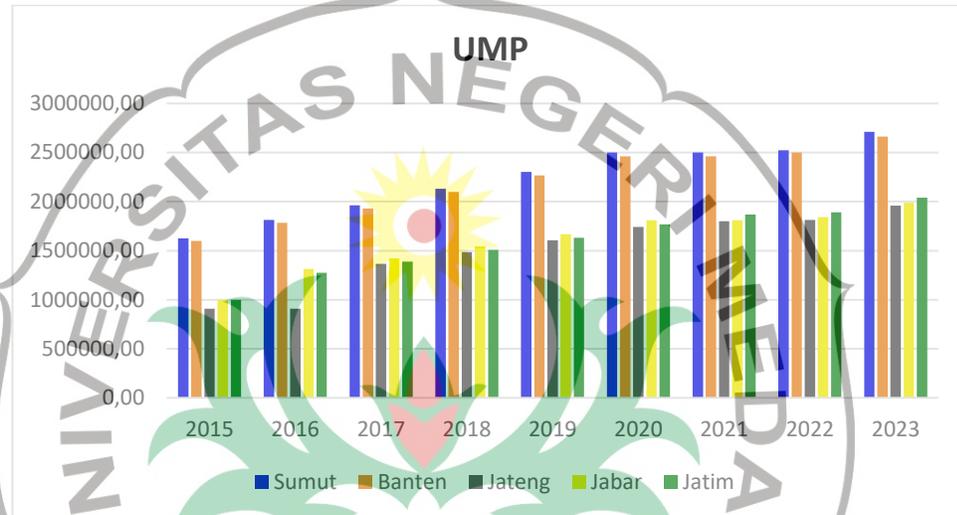
dan non-bangunan. Beberapa proyek infrastruktur multiyears baru mulai beroperasi mendekati pertengahan tahun 2018, sehingga nilai investasi mengalami penurunan. Apabila infrastruktur sudah tersedia dan investor berjalan secara penuh maka proyeksi tenaga kerja yang diserap sebanyak 83.304 orang. Dan pada tahun 2020 berdasarkan Rapor Investasi Sumatera Utara, investasi PMDN kembali mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 1,5 triliun. Januari-Desember Tahun 2020 total realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Barat yang direalisasikan oleh para investor di 27 Kabupaten/Kota mencapai Rp120,4 triliun. Realisasi sepanjang 2020 ini menurun dibanding periode yang sama 2019 lalu yang mencapai Rp137,069 triliun, terbitnya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 diharapkan mengatasi masalah perizinan yang terjadi di daerah dan dapat mengatasi permasalahan realisasi investasi yang menurun di tahun 2020.

Sebaliknya di tengah kondisi perekonomian yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, sektor investasi di Provinsi Banten justru tumbuh positif. Realisasi investasi di Banten periode tahun 2020 mencapai Rp62,01 triliun atau naik 21,4% dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya. Capaian tersebut berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi 73.663 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Banten, dimana nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp31,16 triliun (50,22%) dengan 5.833 proyek dan PMA dengan 3,288 proyek.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Gunadi tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Samarinda” menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa besarnya investasi akan berdampak terhadap jumlah dari tenaga kerja di suatu daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah. Upah merupakan harga dari tenaga kerja yang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha kepada tenaga kerja untuk melindungi para pekerja agar tidak mendapatkan upah yang terlalu rendah, sehingga upah yang diterima seimbang dengan kinerja yang mereka lakukan dan mencukupi standar kebutuhan hidup layak (KHL). Menurut Mankiw (2013) penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut Simanjuntak (2001), kenaikan upah akan berpengaruh secara signifikan. Dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, kenaikan tingkat upah dapat menyebabkan pendapatan (income effect) berkurang sehingga kondisi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja karena jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum dapat menjadi masalah ketenagakerjaan yang memicu peningkatan jumlah pengangguran.

Gambar 1.4 Grafik UMP Pada Lima Provinsi



Seperti pada gambar grafik UMP sebelumnya dapat dilihat pada umumnya kenaikan UMP dapat dikatakan stabil. Provinsi Jawa Timur menetapkan Upah minimum provinsi 2017 sebesar 1.388.000 naik dari upah minimum provinsi 2016 yang sebesar 1.273.349. Kenaikan jumlah upah minimum provinsi Jawa Timur dapat disebabkan beberapa faktor salah satunya yakni pembangunan diseluruh sektor. Banyaknya pembangunan pabrik sektor industri mengakibatkan kenaikan upah minimum provinsi Jawa Timur. Selain pembangunan pabrik terdapat pembangunan mall dan hotel yang sangat banyak di Jawa Timur. Sedangkan provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan UMP pada tahun 2022 sebesar Rp23.187 menjadi Rp2.522.610 setelah pada tahun sebelumnya tidak mengalami kenaikan. Kenaikan yang tidak terlalu tinggi ini akibat pasca pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang sempat mencapai angka minus.

Umumnya upah minimum seringkali disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing daerah, seperti pada tahun yang sama yaitu 2019 pada provinsi Sumatera Utara dan Banten terjadi perbedaan tingkat upah yang ditetapkan. Upah minimum biasanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah dimana KHLBanten berbeda dengan Sumatera Utara, sehingga memengaruhi besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Angka tersebut mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan penghitungan nilai UMP didasarkan pada formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional disesuaikan dengan pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Jika dihitung berdasarkan rumusan tersebut, UMP Banten besaran UMP Banten 2019 sekira Rp2.267.990 dan Sumatera Utara Rp 2.303.403.

Penelitian yang dilakukan oleh Meilasari tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh UMP, PDRB Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Industri Di Pulau Jawa” menunjukkan bahwa UMP mempunyai pengaruh yang Negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun Hasil sebaliknya juga diperlihatkan oleh Atiyatna, Nurlina & Soebyakto (2016) yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan” menjelaskan bahwa upah minimum mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa besarnya

UMP akan berdampak meningkatkan juga dapat berdampak sebaliknya terhadap jumlah dari tenaga kerja di suatu daerah.

Permasalahan penyediaan kesempatan kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Karena jika terjadi ketidak seimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan atau perluasan lapangan kerja yang dapat terjadi atas efek yang timbul dari peningkatan upah yang merupakan kesepakatan bersama hal ini akan menyebabkan tingginya angka pengangguran yang kemudian akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada dan meningkatnya beban masyarakat. Semua itu merupakan sumber utama penyebab kemiskinan, mendorong terjadinya keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis pun tertarik untuk menulis proposal yang berjudul "Analisis Jumlah Penduduk, Investasi Dan UMP Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Lima Provinsi Dengan Penduduk Terbanyak Di Indonesia"

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengumpulan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Penyerapan tenaga kerja pada masing-masing provinsi yang diteliti mengalami fluktuasi selama tahun penelitian.
2. Peningkatan Jumlah Penduduk pada provinsi yang diteliti cenderung meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
3. Peningkatan Investasi yang sulit dikendalikan pada provinsi yang diteliti cenderung meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
4. Peningkatan UMP pada provinsi yang diteliti cenderung meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

1.3 Pembatasan Masalah

Demi memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis menitikberatkan pada:

1. Penyerapan tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
2. Jumlah Penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
3. Investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PMDN dan PMA pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
4. UMP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upah minimum pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia?
2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia?
3. Apakah UMP berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia?
4. Apakah Jumlah Penduduk, Investasi dan UMP berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah-masalah diatas ingin yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai wadah dalam mengasah daya pikir dan instrumen pelatihan penulisan karya ilmiah dengan pemanfaatan ilmu teoritis dan kajian aktualisasi sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas.

2. Bagi Masyarakat/Pemerintah

Menjadi Salah satu referensi bagi masyarakat/pemerintah daerah untuk menentukan langkah atau kebijakan bagi kemajuan wilayah pada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak.

3. Bagi Akademisi

THE
Character Building
UNIVERSITY

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan referensi penelitian selanjutnya dengan mengangkat topik yang sama.

4. Bagi Instansi/Perusahaan

Hasil riset ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan perekrutan tenaga kerja.



THE *Character Building*
UNIVERSITY